

# PERAN KEBANGSAAN MUHAMMADIYAH DI INDONESIA

Fadillah Rosa Siregar<sup>1</sup>, Yulan Sari<sup>1</sup>, Rosmaimunah Siregar<sup>2</sup>, Jumaita Nopriani Lubis<sup>3</sup>, Sri Wahyuni<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Pendidikan Agama Islam

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

<sup>4</sup>Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Pendidikan Islam Anak Usia Dini

Email: [rosmaimunah@um-tapsel.ac.id](mailto:rosmaimunah@um-tapsel.ac.id)

## ABSTRACK

This study discusses the role of Muhammadiyah nationality in Indonesia. The purpose of his research is to find out what are the roles of Muhammadiyah for Indonesia. This type of research is library research. This research makes Library materials as its main data source. The results of the research obtained are, Muhammadiyah was founded by K.H Ahmad Dahlan in 1912 precisely in Yogyakarta. The purpose of Muhammadiyah is to uphold and uphold the religion of Islam so that a true Islamic society is realized. Muhammadiyah's efforts and activities are very broad, one of which is in the political field. Muhammadiyah has a very strategic role in the midst of the people and nation in the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). Muhammadiyah has a collective obligation to preach Islam in the form of beramar ma'ruf nahi munkar and provide ethical, moral and moral guidance to government and community policies. Muhammadiyah as a national force has fought in the independence movement and through its figures was actively involved in establishing the Republic of Indonesia. After Indonesia's independence, Muhammadiyah's devotion to the nation and state continued.

**Keywords:** *Role of Muhammadiyah, Nation, Indonesia*

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang peran kebangsaan muhammadiyah di Indonesia. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui apa saja peran Muhammadiyah untuk Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menjadikan bahan Pustaka sebagai sumber data utamanya. Hasil penelitian yang diperoleh adalah, Muhammadiyah didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan pada tahun 1912 tepatnya di Yogyakarta. Tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Usaha dan kegiatan Muhammadiyah itu sangat luas, salah satunya yaitu dibidang politik. Muhammadiyah mempunyai peran yang sangat strategis di tengah- tengah umat dan bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Muhammadiyah memiliki kewajiban kolektif untuk mendakwahkan Islam dalam bentuk beramar ma'ruf nahi munkar dan memberikan panduan etika, moral dan akhlakul karimah terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan masyarakat. Muhammadiyah sebagai kekuatan nasional telah berjuang dalam pergerakan kemerdekaan dan melalui para tokohnya terlibat aktif dalam mendirikan Negara Republik Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pengabdian Muhammadiyah terhadap bangsa dan negara berlanjut.

**Kata Kunci:** *Peran Muhammadiyah, Bangsa, Indonesia*

## 1. PENDAHULUAN

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Arti kata Muhammadiyah sendiri adalah pengikut Muhammad atau dikenal sebagai orang – orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW (ST Rajiah Rusydi,139). Tujuan didirikan Muhammadiyah adalah untuk memperbaiki Akhlakul karimah dan memajukan sosial Pendidikan masyarakat muslim serta mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam peroses dakwah yang menyebabkanajaran Islam bercampur baur dengan kebiasaan di daerah

tertentu dengan alasan adaptasi. Tujuan Muhammadiyah juga ingin menegakkan dan menjunjung tinggi Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya Muhammadiyah sebagai Gerakan dalam mengikuti perkembangan dan perubahan itu senantiasa mempunyai kepentingan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar serta menyelenggarakan gerakan dan amal usaha yang sesuai dengan lapangan yang dipilihnya, ialah Masyarakat sebagai usaha Muhammadiyah untuk mencapai tujuannya (HanifatuzZahro, Agus Sastrawan Noor, Andang Firmansyah, 1990-2000).

Kelahiran Muhammadiyah pada tahun 1912 menunjukkan bahwa organisasi ini dari segi kesejarahan memiliki pengalaman yang lebih banyak dibandingkan dengan negara Indonesia yang baru berdiri pada tahun 1945. Walaupun Muhammadiyah tidak pernah mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah organisasi politik, namun dengan usianya yang lebih tua dari usia Republik ini maka Muhammadiyah selalu aktif dalam pergumulan dan berbagai pergulatan pentas politik kebangsaan nasional. Muhammadiyah terlihat terlibat dalam pentas politik nasional karena keterlibatan para pimpinan elitnya dan selalu dijalankan dalam bingkai amar ma'ruf nahi munkar atau yang sering diartikan dengan bahasa yang populer yaitu high politics. Perkembangan pentas politik Islam dalam negara tidak bisa lepas dari peran politik Muhammadiyah, bahkan kebangkitan nasional juga merupakan bagian dari mata rantai persinggungan Muhammadiyah dengan negara (Alip Sugianto, 2021).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Khittah Muhammadiyah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Khittah atau garis-garis perjuangan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya termaktub dalam keputusan sidang Majelis Tanwir di Ponorogo pada tahun 1969. Khittah ini kemudian dikenal dengan Khittah Ponorogo yang berisi tentang pola dasar perjuangan tentang cara dan strategi Muhammadiyah dalam mewujudkan cita-cita dan keyakinan hidupnya. Dalam khittah ini ditegaskan Kembali dakwah Islam Amar Ma'ruf, NahiMungkar harus dilaksanakan melalui dua cara yaitu saluran politik praktis dan saluran masyarakat.

Pertama melalui kegiatan-kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan/kenegaraan (real politics, politik praktis) sebagaimana dilakukan oleh partai-partai politik atau kekuatan-kekuatan politik formal di tingkat kelembagaan negara. Kedua, melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan-kegiatan politik tidak langsung (high politics) yang bersifat mempengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral (moral force) untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara sebagaimana dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan (interest groups).

Muhammadiyah yang sejak awal mengakui sebagai organisasi sosial-keagamaan yang mengemban sebuah misi da'wah amr ma'ruf nahi munkar terus bersikap aktif dan konstruktif dalam usaha-usaha pembangunan dan reformasi nasional sesuai khittah (garis) perjuangannya serta tidak tinggal diam dalam menghadapi kondisi-kondisi kritis yang dialami oleh bangsa dan negara. Oleh karena itu, Muhammadiyah senantiasa terpanggil untuk berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berdasarkan pada khittah perjuangan sebagai berikut: 1) Muhammadiyah meyakini politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniawian (al-umur ad-dunyawiyat) yang harus selalu dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama. Karena itu diperlukan sikap dan moral

yang positif dariseluruh warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan politik demi tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara. 2) Muhammadiyah meyakini bahwa negara dan usaha-usahanya dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara baik melalui perjuangan politik maupun melalui pengembangan masyarakat pada dasarnya merupakan wahana yang mutlak diperlukan untuk membangun kehidupan dimana nilai-nilai Ilahiyah melandasi dan tumbuh suburnya bersamaan dengan tetap tegaknya suatu nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, perdamaian, ketertiban, kebersamaan, dan keadaban demi terwujudnya “Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur”. 3) Muhammadiyah (menyatakan) memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan/pemberdayaan Masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani (civil society) yang kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah yaitu terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan kenegaraan sebagai proses dan hasil dari fungsi politik pemerintahan akan ditempuh melalui pendekatan-pendekatan secara tepat dan bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip perjuangan kelompok kepentingan yang bersifat efektif dalam kehidupan negara yang demokratis. 4) Muhammadiyah mendorong secara kritis atas suatu perjuangan politik bersifat praktis atau berorientasi pada kekuasaan (real politics) untuk dijalankan oleh partai-partai politik dan lembaga-lembaga formal kenegaraan dengan baik menuju terciptanya sistem politik yang demokratis dan berkeadaban sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan negara. Dalam hal ini perjuangan politik yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik harus benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat dan tegaknya nilai-nilai utama sebagaimana yang menjadi semangat dasar dan tujuan didirikannya suatu Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan tahun 1945. 4) Muhammadiyah senantiasa atau selalu memainkan peranan politiknya sebagai wujud dari dakwah amr ma’ruf nahi munkar dengan jalan mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai konstitusi dan Cita-cita luhur bangsa. Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan perekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban. 5) Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak memiliki hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi mana pun. Muhammadiyah senantiasa mengembangkan sikap positif dalam memandang perjuangan politik dan menjalankan fungsi kritik sesuai dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban. 6) Muhammadiyah memberikan kebebasan pada setiap anggota persyarikatan untuk menggunakan hak pilih dalam kehidupan politik sesuai hati nuraninya masing-masing. Penggunaan hak pilih tersebut merupakan bentuk tanggungjawab sebagai warga negara yang dilaksanakan secara rasional dan kritis sesuai misi dan kepentingan Muhammadiyah demi kemaslahatan bangsa dan negara. 7) Muhammadiyah meminta pada segenap anggotanya yang aktif dalam bidang politik untuk benar-benar melaksanakan tugasnya dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dan mengedepankan tanggung jawab (amānah), akhlak mulia (akhlaq al-karimah, keteladanan (uswah hasanah) dan perdamaian (iṣlah). Aktifitas (kegiatan) politik harus (benar) sejalan dengan upaya memperjuangkan misi persyarikatan dalam melaksanakan dakwah amr ma’ruf nahi munkar. 8) Muhammadiyah senantiasa bekerjasama dengan pihak atau golongan mana pun berdasarkan prinsip-prinsip kebajikan dan kemaslahatan (kedamaian), menjauhkan kemudharatan dan bertujuan membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik, maju, demokratis dan berkeadaban (Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2002).

## B. Muhammadiyah sebagai bagian dari pendiri NKRI

Ir. Sukarno, Ki Bagus Hadikusumo, KH Abdul Kahar Mudzakir dan Mr. Kasman Singodimedjo adalah orang-orang Muhammadiyah yang terlibat intensif dalam meletakkan dasar-dasar ideologi negara dan konstitusi Republik ini di BPUPKI dan PPKI. Kemudian Ir. Sukarno dan KH Mas Mansur (Ketua PP Muhammadiyah) yang bersama-sama Drs. M. Hatta dan Ki Hadjar Dewantara terlibat dalam Empat Serangkai memperjuangkan kemerdekaan.

Secara faktual yang memproklamasikan Indonesia itu adalah anggota Muhammadiyah, Ir. Sukarno. Bung Karno dalam peringatan setengah abad Muhammadiyah di Jakarta menyatakan “Saya menjadi anggota resmi Muhammadiyah dalam tahun 1938 sekarang sudah 1962, jadi sudah 24 tahun....”. (Lihat: Makin Lama Makin Cinta Muhammadiyah, hlm. 13). Jadi Bung Karno adalah anggota resmi Muhammadiyah yang sadar berorganisasi dan sadar akan pentingnya kontribusi bagi organisasi. Oleh karena itu jelas bahwa yang menjadi proklamator kemerdekaan itu adalah anggota Muhammadiyah Ir Sukarno (M Sukriyanto AR, 2019).

Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang memiliki ideologi yang sama dengan cita-cita Indonesia, yakni seperangkat paham tentang kehidupan dan strategi perjuangan untuk mewujudkan cita-cita Bangsa, salah satu Ideologi Muhammadiyah yaitu ajaran atau ilmu pengetahuan yang secara sistematis dan menyeluruh membahas mengenai gagasan, cara-cara, angan-angan, atau gambaran dalam pikiran untuk mendapatkan keyakinan mengenai hidup dan kehidupan yang benar dan tepat berdasarkan tuntunan Al- Qur’an dan As-Sunnah, salah satu ideologi ini sama halnya dengan tujuan dan cita-cita bangsa yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia yang berdasarkan pada tuntunan agama.

Meskipun Muhammadiyah telah menetapkan visinya tentang masyarakat ideal, namun Muhammadiyah tidak memiliki niat untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Muhammadiyah harus memegang teguh kerangka NKRI dalam konteks nasionalisme karena beberapa alasan: Muhammadiyah menginginkan kesejahteraan umat (masalah ummah) sebagai tujuan utama perjuangan politik Muhammadiyah sebagai partai politik. Muhammadiyah sangat menyadari bahwa gerakan globalisasi mengandung “agenda baru atau tersembunyi dari para pendukungnya, sehingga Muhammadiyah harus membangun konsep negara demi kedaulatan negara, bangsa dan wilayah, dan untuk membentengi negara dari intervensi negara lain sebagai akibat dari ketidakadilan global (Alip Sugianto, 2021).

### C. Tanggung Jawab Muhammadiyah Terhadap NKRI

Kiprah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah amr ma’ruf nahi mungkar yang ditunjukkan kepada dua bidang yaitu bidang perseorangan dan bidang kelompok Masyarakat demi menciptakan kehidupan islami, aman, damai dan Sejahtera itu adalah bentuk kepedulian Muhammadiyah pada negara. Kepedulian ini merupakan bentuk tanggung jawab terhadap negara Indonesia dalam menciptakan dan mewujudkan negara yang berkemajuan.

Muhammadiyah telah ikut berbuat nyata-nyatanya untuk memajukan kehidupan bangsa dibidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat. Apa yang selama ini dikerjakan Muhammadiyah telah diakui oleh masyarakat luas dan Pemerintah Republik Indonesia. Dalam kerangka itu, pemerintah menetapkan K.H. Ahmad Dahlan sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 657 tanggal 27 Desember 1961, dengan pertimbangan sebagai berikut: pertama, kepeloporan dalam membangun umat Islam Indonesia untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang harus belajar dan berbuat. Kedua, memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsa, ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan dan beramal bagi masyarakat dan umat. Ketiga, memelopori amal-usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangunan dan kemajuan bangsa, dengan jiwa ajaran Islam. Keempat, melalui organisasi Aisyiyah telah memelopori kebangunan Perempuan bangsa Indonesia untuk mengecap pendidikan dan

berfungsi sosial, setingkat dengan kaum pria (Tim Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2014:7).

Pasca Indonesia mendapatkan kemenangan gemilang(merdeka), berbagai periode pemerintahan hingga periode reformasi, pengabdian Muhammadiyah terhadap bangsa dan negara terus berlanjut. Khidmat kebangsaan ini didorong oleh keinginan yang kuat agar Indonesia mampu melangkah ke depan sejalan dengan cita-cita kemerdekaan. Inilah bukti bahwa Muhammadiyah ikut “berkeringat” di dalam usaha-usaha memajukan kehidupan bangsa.

Tanggungjawab Muhammadiyah terhadap NKRI dengan cara merawat dan menjaga keutuhan Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan mengisi kemerdekaan melalui pengembangan di berbagai sektor pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan dan sektor lain untuk kesejahteraan masyarakat, serta menjaga komitmen kebangsaan yang adil dan makmur. Selain mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Muhammadiyah juga menjaga ideologi kebangsaan yang berfalsafah pada Pancasila sebagai konsensus dan kesepakatan para pendiri bangsa, maka jika ada sekelompok oknum yang ingin mengubah ideologi negara seperti komunis, Muhammadiyah dengan tegas menolak karena tidak sesuai dan selaras dengan cita-cita Muhammadiyah terhadap bangsa Indonesia.

### **3. METODE**

Penelitian ini bersumber dari kepustakaan (library research). Artinya, data dan bahan kajian yang dipergunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik yang berupa buku, ensiklopedi, jurnal maupun yang lainnya. Metode Yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan literature review. Dalam pengumpulan data, penelitian ini tidak menggunakan metode khusus. Artinya segala cara untuk data kepustakaan, baik primer maupun sekunder, yang berkaitan dengan permasalahan di atas akan diupayakan semaksimal mungkin dan memudahkan prinsip dari perkembangan dalam proses belajar mengajar. (Agustina, 2018).

### **4. HASIL PEMBAHASAN**

Model peran dan Kebangsaan Muhammadiyah cukup memperoleh perhatian serius dari pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Hal ini terbukti PP Muhammadiyah mengeluarkan kebijakan terkait hal tersebut sebagaimana dalam khittah Muhammadiyah di Ponorogo tahun 1969 pada saat era kepemimpinan KH. AR Fahrudin pada point C yang mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan dakwah islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan masyarakat. Tidak mempunyai afiliasi dengan partai politik manapun dan memberikan hak seluas-luasnya kepada anggotanya untuk masuk ke partai politik manapun (Alip Sugianto, 2021).

Khittah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan di Denpasar (Khittah Denpasar), Muhammadiyah memandang bahwa berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan dakwah amr ma'ruf nahi munkar sebagaimana telah menjadi panggilan sejarah sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia. Peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut diwujudkan dalam langkah-langkah strategis dan taktis sesuai kepribadian, keyakinan, cita-cita hidup, serta khittah perjuangan sebagai acuan gerakan sebagai wujud komitmen dan tanggungjawab dalam mewujudkan suatu negara “Baldantun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur” (Haedar Nashir, 2010:383).

Peran Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan melalui dua strategi dan lapangan perjuangan, yaitu: pertama, melalui kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan/ kenegaraan (real politics, politik praktis) sebagaimana dilakukan oleh partai-partai politik atau kekuatan-kekuatan politik formal di tingkat lembaga suatu negara. Kedua, melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan politik tidak langsung (high politics) yang bersifat mempengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral (moral force) untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara sebagaimana halnya dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan (interest group) (Haedar Nashir, 2010: 284).

Muhammadiyah secara khusus mengambil peran dalam lapangan kemasyarakatan dengan pandangan bahwa aspek kemasyarakatan yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat tidak kalah penting dan strategis daripada aspek perjuangan politik kekuasaan. Perjuangan di lapangan kemasyarakatan diarahkan untuk terbentuknya Masyarakat utama atau masyarakat madani (civil society) sebagai pilar utama terbentuknya negara yang berkedaulatan rakyat. Peran kemasyarakatan tersebut dilakukan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti halnya Muhammadiyah. Sedangkan perjuangan untuk meraih kekuasaan (power struggle) ditujukan untuk membentuk pemerintahan dalam mewujudkan tujuan negara, yang perannya secara formal dan langsung dilakukan oleh partai politik dan institusi-institusi politik negara melalui sistem politik yang berlaku. Kedua peranan tersebut dapat dijalankan secara objektif dan saling terkait melalui bekerjanya sistem politik yang sehat oleh seluruh kekuatan nasional menuju terwujudnya tujuan negara (Alip Sugianto, 2021).

## **5. KESIMPULAN**

Muhammadiyah berpandangan bahwa dalam berkiprah terhadap peran kebangsaan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu politik praktis yang berorientasi melalui kegiatan politik, kekuasaan, atau kenegaraan dan melalui jalur kegiatan kemasyarakatan seperti ormas, pemberdayaan Masyarakat maupun kegiatan yang secara tidak formal pada bidang politik. Kedua saluran itu, sebagai sarana perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan dakwah amar makruf nahi mungkar. Muhammadiyah sebagai kelompok organisasi masyarakat dapat memainkan peran penting sebagai agen control pemerintahan, penyeimbang, penasehat serta melakukan lobi-lobi politik keumatan yang dapat masuk keseluruh lini baik itu pendidikan, sosial, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya dalam rangka menjaga stabilitas, kemajuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Muhammadiyah dengan khittah dan manhaj gerakan yang melandasi serta mbingkainya dapat memainkan peran kebangsaan secara lebih proaktif melalui aktualisasi kerja-kerja dakwah kemasyarakatan yang lebih progresif, baik untuk memperkuat basis civil-society maupun penguatan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Khittah perjuangan Muhammadiyah ini harus dapat mencerminkan peran Muhammadiyah dalam menjalankan fungsinya organisasi modern yang berorientasi masa depan. Selain itu, Khittah perjuangan harus menjadi variable pengubah kultural dalam berorganisasi para kader terutama sekali dari kalangan angkatan muda Muhammadiyah ke arah yang lebih baik, agar kultural hasanah mereka dalam setiap nadi Gerakan Muhammadiyah, maka diperlukan upaya pembumih semangat saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran dan saling berlomba-lomba untuk menuju cinta dan kasih sayang Allah yang melandasi perjuangan pada cita-cita Muhammadiyah untuk menciptakan masyarakat Islam yang sebenarnya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Nora. 2018. *Perkembangan Peserta Didik*, Yogyakarta: CV Budi Utama.  
<https://pwmjateng.com/khittah-perjuangan-dalam-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara>  
<http://www.suaramuhammadiyah.id/2015/12/28/masih-perlu-road-map-mengisi-negara-pancasila/>.
- Nashir, H. (2009). Manhaj Gerakan Muhammadiyah Ideologi, Khittah, dan Langkah. *Suara Muhammadiyah*. Yogyakarta: *Suara Muhammadiyah*.
- Nilwani, H., Ag, S., & Pd, M. (2016). Kiprah Muhammadiyah dalam Kancah Politik Nasional. *Jurnal Tarbawi Khatulistiwa*, 2(2).
- Penyusun, T. (2014). Indonesia Berkemajuan Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan yang Bermakna. Yogyakarta: *PP Muhammadiyah*.
- Rohmansyah, S. M. (2018). Kuliah Kemuhammadiyah. Yogyakarta: *Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M)*.
- Rusydi, R. (2016). Peran Muhammadiyah (Konsep pendidikan, usaha-usaha di bidang pendidikan, dan tokoh). *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 139-148.
- Wahrudin, B., Sugianto, A., Kusnawan, W., & Muslich, A. (2021). AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN: MERETAS JALAN PENCERAHAN.
- Zahro, H., Noor, A. S., & Firmansyah, A. (2019). Sejarah Perkembangan Muhammadiyah di Kota Pontianak dari Tahun 1990-2000. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 8(7).